

**NASKAH PUBLIKASI**

**Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan  
Bidang Pendidikan Di Kabupaten Bantul Tahun 2017**

'Afiat Fajriyati

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

[afiatfajriati@gmail.com](mailto:afiatfajriati@gmail.com)



**NASKAH PUBLIKASI**

**Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan  
Bidang Pendidikan Di Kabupaten Bantul Tahun 2017**



Oleh:

**Afiat Fairiyati**

20140520020

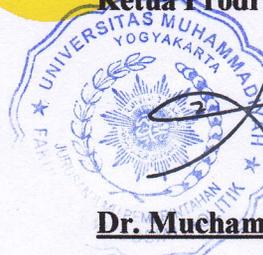
**Dosen Pembimbing**

**Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.**



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

**Dr. Lili Purwaningsih, S.IP., M.Si.**



**Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**

# KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN

*Afiat Fajriyati<sup>1</sup>, Dian Eka Rahmawati<sup>2</sup>, Erni Zuhriyati<sup>3</sup>, Eko Priyo Purnomo<sup>4</sup>*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183,  
telp/fax +62 274 387656/ +62 274 387646

*e-mail: <sup>1</sup>[afiatfajriati@gmail.com](mailto:afiatfajriati@gmail.com), <sup>2</sup>[dianekarahmawati93@gmail.com](mailto:dianekarahmawati93@gmail.com),  
<sup>3</sup>[ernizuhriyati@yahoo.com](mailto:ernizuhriyati@yahoo.com), <sup>4</sup>[eko@umy.ac.id](mailto:eko@umy.ac.id)*

**Abstract.** This study aims to determine the communication process of Bantul Regency government in implementing Outlook Family Program (PKH). PKH is a social protection program in the form of cash grants to the poor. The general objective of PKH is to improve access to education, health, and social welfare services in support of the quality of life of poor families. PKH is expected to reduce the burden of short-term family expenditure in the short term and break the chain of poverty in the long term. In disclosing this problem, researchers use a model of government communication process developed by Lasswell. The type of this research is descriptive research with the qualitative approach. Based on the obstacles in the ongoing process of government communication on the implementation of PKH in Bantul District there are obstacles that are the difference of status and limitation in government communication. PKH is an effort to alleviate poverty but does not involve the participation of the community as a whole because the government has a more dominant role in implementing PKH.

**Keywords:** *Government Communication, Outlook Family Program, PKH, Implementation, Bantul.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program perlindungan social yang berbentuk pemberian dana tunai kepada masyarakat miskin. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Dalam mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan model proses komunikasi pemerintahan yang dikembangkan oleh Lasswell. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hambatan dalam berlangsungnya proses komunikasi pemerintah pada pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul terdapat hambatan yaitu adanya perbedaan status dan pembatasan dalam komunikasi pemerintah. PKH sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan namun tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan karena pemerintah memiliki peran yang lebih dominan dalam melaksanakan PKH.

**Kata kunci:** *Komunikasi Pemerintah, Program Keluarga Harapan, PKH, Pelaksanaan, Bantul.*

## **Pendahuluan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kabupaten Bantul. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya koordinasi melalui komunikasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul karena menjadi salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang aktif melaksanakan PKH dan memiliki jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 di Provinsi Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten lain yaitu sebanyak 153.490 jiwa, ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Bantul yang belum mendapat kesejahteraan seperti apa yang menjadi tujuan negara. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan maka pada tahun 2007 mencanangkan PKH yang merupakan bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer) yang bersifat top down (Suntiana, 2015).

Tujuan adanya PKH yaitu membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan harapan adanya akses untuk layanan tersebut akan memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan cara peningkatan kualitas pendidikan untuk kapasitas pendapatan anak di masa depan, kesehatan/nutrisi, dan kesejahteraan atau jaminan sosial bagi lanjut usia (Pedoman Umum PKH, 2016). Pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kabupaten Bantul yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen anak usia sekolah yaitu 6-21 tahun di dalam anggota keluarga dan diharuskan memenuhi komitmen sebagai peserta PKH dalam komponen pendidikan yaitu terdaftar sebagai siswa disekolah dan kehadiran di sekolah minimal 85% untuk mendapatkan bantuan dana PKH (Pedoman Umum PKH, 2016). Manfaat lain yaitu untuk mengurangi pekerja anak dibawah umur dan mempercepat pencapaian MDGs.

PKH di Kabupaten Bantul mulai dilaksanakan sejak tahun 2008, awalnya hanya mencakup 5 Kecamatan yaitu Kasihan, Sewon, Imogiri, Dlingo, Sanden. Setelah berjalan satu tahun pada tahun 2009 lokasi program ditambah dua Kecamatan yaitu Banguntapan dan Pandak. Pada tahun 2011 PKH telah mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 17 Kecamatan (Hanif, 2016). Menurut Imansari (2015) salah satu

faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan di Bantul yaitu faktor mata pencaharian atau pekerjaan yang tidak tetap yang berpengaruh terhadap jumlah pendapatan atau penghasilan menjadi tidak menentu.

Peran Pemerintah sangat dominan dalam proses komunikasi untuk berljalannya program (Suntiana, 2015). Pada pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul yang berperan sebagai pelaksana kegiatan adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial sebagai ketua pelaksana serta Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pelaksana program. Masyarakat peserta PKH yang berhasil dalam proses verifikasi sebagai penerima bantuan tunai PKH. Menurut Hasan (2014) dalam bukunya yang berjudul komunikasi pemerintahan menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah merupakan penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Sehingga apabila dikaitkan dengan PKH maka adanya kebijakan program tersebut untuk pembangunan bagi masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar (2015) dengan judul: Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Dari penelitian diatas melakukan penelitian dari aspek peraturan komitmen, kepatuhan pelaksana PKH dengan komunikasi yang dilakukan pendamping dan sikap pelaksana PKH (Bakhtiar, 2015). Komunikasi yang terdapat dalam penelitian tersebut berbeda dengan komunikasi pemerintah, sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema penelitian yakni komunikasi pemerintah dan objek penelitian yaitu Ketua pelaksana PKH dan Pelaksana PKH dari Dinas Sosial, Koordinator Kecamatan atau Pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH.

### **Metode**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah di Kabupaten Bantul, sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumber data primer diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan mencari

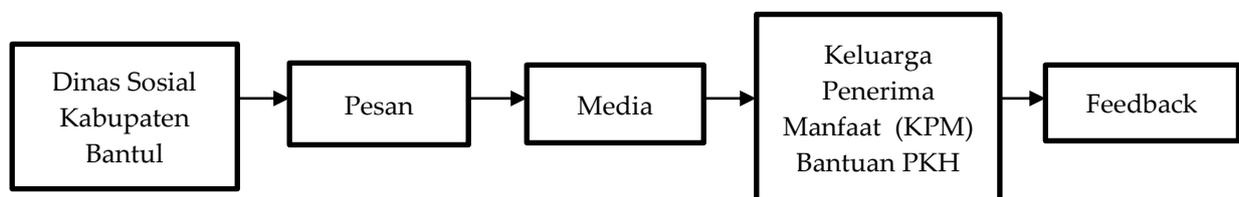
dokumen-dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sebagai kelanjutan proses dari pengumpulan data dan kesimpulan pembuatan.

### H a s i l

Proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul dilakukan melalui rapat koordinasi sebagai bentuk komunikasi internal dalam pemerintah dan pertemuan kelompok dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH setiap hari selasa di minggu kedua dan hari jumat di minggu kedua. Koordinasi dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk dilakukan evaluasi bersama pendamping dan peserta PKH setelah penyaluran bantuan PKH. Koordinasi satu bulan sekali yang bersifat mendesak apabila terdapat hal dari Kementerian yang harus segera disampaikan ke pendamping PKH atau koordinator Kecamatan. Rapat koordinasi dilakukan bertujuan untuk kelancaran dalam menyampaikan informasi.

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Pendamping atau koordinator Kecamatan dan Pemerintah Provinsi. Komunikasi Pemerintahan menurut model Lasswell yaitu komunikasi yang ditunjukan kepada siapa, dan berpengaruh apa kepada komunikan. Dimana terdapat beberapa elemen yang terdapat pada model Lasswell yaitu siapa pembicara, terdapat pesan, saluran atau medium , siapa audience dan efek yang ditimbulkan (Abidin, 2016). Proses komunikasi dimulai dengan penyampaian pesan melalui media yang di pilih oleh komunikator dan di terima oleh komunikan. Komunikan menerima pesan ini akan memberikan feedback kepada komunikator.

*Tabel dan Gambar*

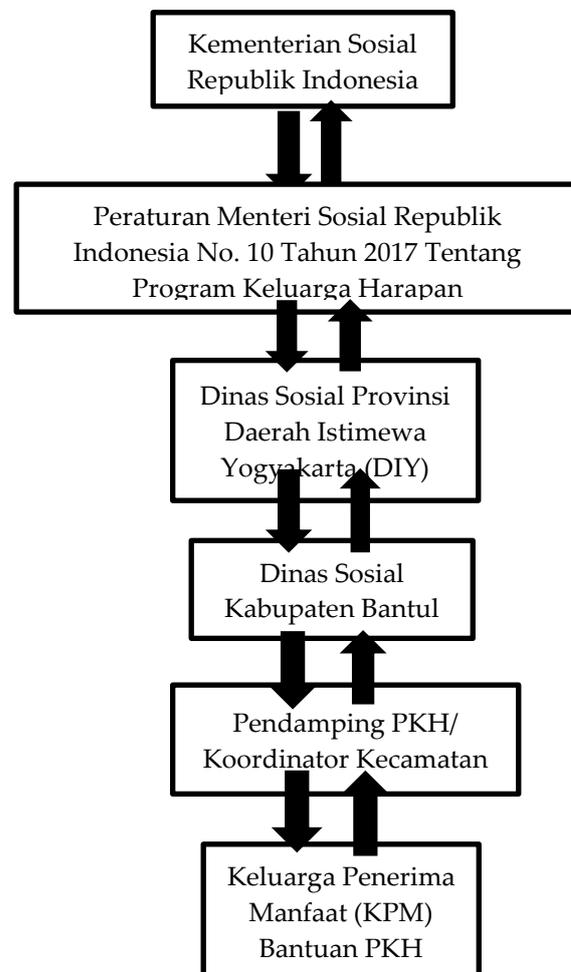


**Gambar 1. Proses Komunikasi Menurut Lasswel**

Sumber : Data Diolah Penulis

Objek yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul yang pertama yaitu pendamping atau koordinator Kecamatan yang berperan sebagai perantara bagi

Pemerintah untuk berinteraksi langsung dengan KPM dan melaporkan hasil kegiatan pada saat pertemuan kelompok kepada Pemerintah Kabupaten. Kemudian yang kedua yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH. Maka untuk melakukan implementasi kebijakan Pemerintah melakukan komunikasi kepada Pendamping dan KPM. Komunikasi yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan PKH bertujuan untuk pembangunan masyarakat sesuai dengan aspek yang terdapat dalam bantuan PKH yaitu melalui kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dilla (2012) dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Pembangunan menjelaskan bahwa komunikasi Pembangunan adalah sebagai upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakasai pembangunan dalam hal ini pemerintah kepada masyarakat sebagai sasaran agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

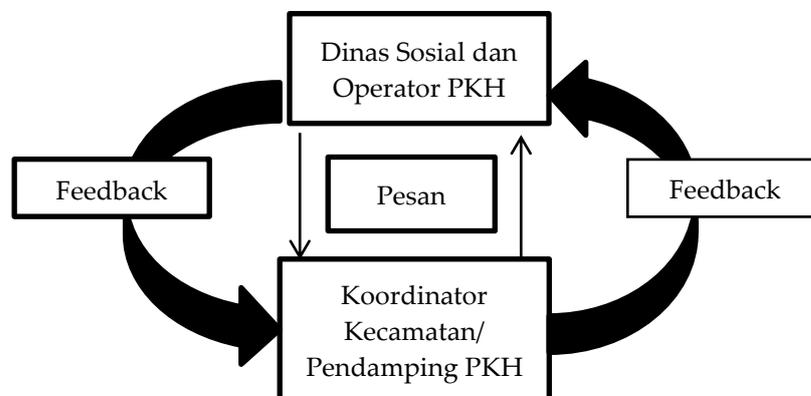


**Gambar 2. Proses Komunikasi Dan Koordinasi Bersifat *Top Down* Dalam Pelaksanaan PKH**

Sumber : Data Diolah Penulis

Proses Komunikasi Pemerintah Kabupaten kepada koordinator kecamatan atau Pendamping dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu Ketua Bidang Bantuan Jaminan Sosial dan Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial. Rapat koordinasi selalu dilaksanakan untuk keberhasilan dan kelancaran program karena dengan adanya komunikasi yang baik akan berpengaruh terhadap jalannya program. Pemerintah melakukan koordinasi dengan Pendamping PKH untuk melakukan evaluasi yakni setiap tiga bulan sekali setelah dilaksanakan penyaluran bantuan PKH. Setiap bulan selalu melakukan koordinasi dengan pendamping. Namun, apabila terdapat hal yang bersifat mendesak maka komunikasi dilakukan dengan mengundang perwakilan setiap koordinator Kecamatan.

Peran pendamping disini yaitu untuk perantara dari pemerintah kepada KPM pada saat pertemuan kelompok. Sehingga dengan adanya peran Pendamping memberikan kemudahan bagi peserta PKH atau KPM untuk menyampaikan kendala atau keluhan-keluhan yang ditemui untuk kemudian oleh Pendamping disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten. Adanya perubahan data peserta PKH juga perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh pendamping PKH untuk dilaporkan kepada Operator PKH yang berkantor di UPPKH Kabupaten di Dinas Sosial Kabupaten. Pemerintah bersama dengan Pendamping bekerjasama untuk melakukan koordinasi hingga ke tingkat paling rendah yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH. Media untuk mempermudah dan mendukung pelaksanaan PKH secara internal Pemerintah membuat grup aplikasi WhatsApp, sehingga komunikasi dari pihak Dinas Sosial bersama Pendamping melalui aplikasi WhatsApp dan undangan tertulis/cetak.

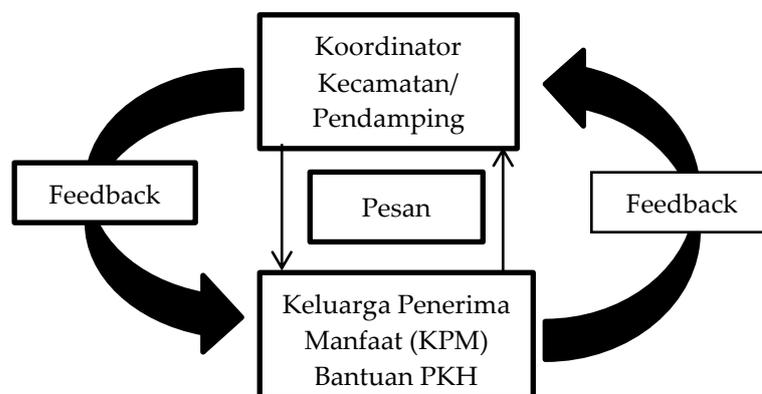


**Gambar 3. Proses Komunikasi Dua Arah Antara Komunikasi Dari Dinas Sosial Dan Koordinator Kecamatan**

Sumber : Data Diolah Penulis

Proses komunikasi kepada masyarakat peserta PKH dilaksanakan oleh Pendamping PKH pada saat pertemuan dan diskusi kelompok yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan yakni pada hari selasa minggu kedua dan hari jumat di minggu kedua. Proses komunikasi antara pendamping dan KPM setiap pendamping mendapat bagian setiap dukuh atau dusun yakni setiap satu pendamping mendampingi sekitar 20 orang dalam satu kelompok karena setiap wilayah desa dibuat pembagian berkelompok, kemudian pendamping akan berkomunikasi dengan ketua kelompok apabila terdapat hal yang akan disampaikan oleh anggota kelompok. Peran pendamping disini adalah untuk berinteraksi secara langsung dengan keluarga penerima manfaat bantuan PKH untuk menyampaikan informasi atau pesan dari Dinas Sosial Kabupaten.

Adanya diskusi dan pertemuan kelompok bertujuan untuk melakukan kegiatan atau program dan memberikan informasi dari Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada KPM. Pendamping juga sebagai perantara bagi KPM untuk menyampaikan informasi berupa keluhan atau kendala seperti belum mendapat bantuan komplementer seperti Kartu Indonesia Pintar, Raskin, dan bantuan komplementer jaminan sosial lainnya. Fungsi pendamping adalah menyampaikan keluhan dari KPM kepada Pemerintah Daerah atau Dinas Sosial sebagai SKPD yang menangani PKH. Namun, apabila terdapat hal yang diharuskan Pemerintah untuk turun langsung seperti melakukan pengarahan atau sosialisasi PKH maka Pendamping dan pelaksana PKH dari Dinas Sosial bekerjasama untuk melakukan pertemuan kelompok.



**Gambar 4. Proses Komunikasi Pemerintah Kepada Peserta PKH**

Sumber : Data diolah penulis

## **Diskusi**

Penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar (2015) dengan judul: Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Dari penelitian diatas melakukan penelitian dari aspek peraturan komitmen, kepatuhan pelaksana PKH dengan komunikasi yang dilakukan pendamping dan sikap pelaksana PKH (Bachtiar, 2015). Komunikasi yang terdapat dalam penelitian tersebut berbeda dengan komunikasi pemerintahan, sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema penelitian yakni komunikasi pemerintah dan objek penelitian yaitu Ketua pelaksana PKH dan Pelaksana PKH dari Dinas Sosial, Koordinator Kecamatan atau Pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH.

Pada hasil penelitian proses komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan PKH sesuai dengan elemen-elemen dalam komunikasi pemerintahan. Hambatan yang ditemui yaitu dengan adanya perbedaan status yang disebabkan karena faktor pendidikan dan pembatasan karena pelaksanaan PKH telah dibuat dan diatur oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga hanya dijalankan sesuai dengan perintah pusat. Elemen-elemen proses komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan PKH sebagai berikut:

### **KOMUNIKATOR**

Dalam proses komunikasi pemerintahan menurut Laswell yang berperan sebagai komunikator tentunya adalah pemerintah ataupun dinas terkait yang melakukan komunikasi. Dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang bertugas menjadi komunikator.

Pada pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial sehingga komunikator dalam program ini adalah Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu Drs. Saryadi, S.IP.M.Si selaku ketua pelaksana PKH di Kabupaten Bantul serta Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu Rahayu Martiningtyas, SH sebagai pelaksana PKH di Kabupaten Bantul.

PKH sebagai kebijakan yang lebih bersifat top down karena data awal berasal dari pusat sehingga peran Pemerintah lebih dominan dalam mengatur jalannya pelaksanaan PKH. Program ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang terpusat atau sentralistis sehingga

Pemerintah Daerah hanya berperan untuk melakukan perintah sesuai dengan perintah atau tugas dari Pemerintah Pusat. Hal ini didasarkan pada saat kepesertaan PKH data telah ditentukan oleh Pusat sehingga Pemerintah Daerah hanya melakukan verifikasi untuk menunjukkan bahwa data yang diberikan dari pusat telah sesuai dengan di lapangan dan layak untuk mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan indikator atau persyaratan.

**Tabel 1. Tabel Komunikator Pelaksanaan PKH di Kabupaten**

No.	Proses Komunikasi Pemerintahan	Kasus	Komunikator
1.	Sosialisasi kepada KPM bantuan PKH	Pelaksanaan PKH	Dinas Sosial Kab. Bantul
2.	Pemberian undangan kepada koordinator kecamatan untuk koordinasi	Pelaksanaan PKH	Dinas Sosial Kab. Bantul
3.	Pemberian Undangan kepada koordinator kecamatan untuk evaluasi	Evaluasi Pelaksanaan PKH	Dinas Sosial Kab. Bantul
4.	Pemberian informasi yang bersifat mendesak untuk koordinasi dengan koordinator kecamatan	Informasi yang bersifat mendesak dari Kementerian Sosial RI	Dinas Sosial Kab. Bantul
5.	Rapat koordinasi bersama tim koordinasi teknis PKH Kabupaten Bantul	Rapat koordinasi tim pelaksana PKH Kabupaten	Dinas Sosial Kab. Bantul

Sumber: Data Diolah Penulis

## PESAN

Pesan dari komunikasi pemerintah ini adalah menyampaikan Informasi dalam PKH secara umum adalah untuk mengentaskan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga diharapkan adanya kebijakan PKH dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin, membantu akses untuk masyarakat miskin melalui layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pesan yang terdapat dalam proses komunikasi ini karena komunikasi berawal dari atasan atau Pemerintah sehingga dalam Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul ditujukan kepada operator PKH Kabupaten, pendamping PKH yang kemudian ditujukan kepada KPM.

**Tabel 2. Tabel Pesan Dalam Komunikasi Pemerintahann Pelaksanaan PKH**

No.	Kasus	Pesan
1.	Pertemuan kelompok dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan PKH/ Masyarakat Peserta PKH	-Sosialisasi pelaksanaan PKH dan internalisasi program yang diberikan kepada peserta PKH (persyaratan kepesertaan PKH, Hak dan Kewajiban peserta PKH dll) -Menyampaikan evaluasi atas

<p>2. Koordinasi dengan koordinator Kecamatan Pendamping PKH</p>	<p>pelaksanaan kewajiban peserta PKH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Melakukan pencatatan dan pelaporan (pemutakhiran data) kegiatan pendamping kepada UPPKH Kabupaten secara rutin setiap bulan sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan.</li> <li>-Melakukan pendampingan KPM PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan.</li> <li>-Memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM PKH.</li> <li>-Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya.</li> <li>-Penyaluran bantuan, Pendamping PKH melakukan koordinasi dan persiapan penyaluran bantuan</li> </ul>
<p>3. Koordinasi dengan koordinator Kabupaten/ Operator PKH Kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penerimaan data dan formulir validasi calon peserta PKH dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping PKH.</li> <li>- Melakukan penerimaan data dan formulir verifikasi komitmen peserta PKH dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping PKH.</li> <li>- Melakukan penerimaan data dan formulir pemutakhiran kepesertaan PKH dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping PKH.</li> <li>- Melakukan penerimaan data hasil validasi, data hasil pemutakhiran, data hasil verifikasi serta data realisasi penyaluran bantuan PKH dari seluruh Pendamping PKH.</li> </ul>

Sumber: Data Diolah Penulis

## MEDIA

Dalam proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH menggunakan media komunikasi internal tertulis berupa Buku Pedoman Pelaksanaan PKH yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial selaku Pengarah Kebijakan PKH. Buku Pedoman

digunakan baik oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku Pelaksana PKH di Kabupaten Bantul, Operator dan Pendamping PKH yang berisi pengetahuan dan kebijakan PKH, mekanisme pelaksanaan PKH hingga monitoring dan evaluasi PKH.

Selain itu terdapat pula saluran/media digunakan untuk menyalurkan bantuan PKH kepada peserta PKH. Saluran/media yang digunakan untuk penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Bantul mengalami beberapa perubahan. Media yang digunakan sebagai penyaluran bantuan tunai pertama kali sebelum adanya inovasi terbaru menggunakan buku rekening dan ATM yaitu Pertama, bantuan tunai PKH disalurkan melalui Kantor Pos. Kedua, bantuan tunai PKH disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) khusus Kabupaten Bantul menggunakan Bank BNI meskipun pada saat awal penyaluran melalui Bank BNI masih menggunakan cara pembayaran komunitas sehingga pegawai Bank BNI yang turun langsung ke masyarakat.

Ketiga, bantuan tunai disalurkan melalui Bis Layanan Gerak (BLG) sehingga tidak seperti memakai himbara namun lebih dipermudah dengan bis untuk lokasi yang sulit dijangkau dan dibantu oleh Pendamping untuk pengambilan bantuan. Kemudian adanya inovasi terbaru pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul saat ini untuk penyaluran bantuan melalui buku rekening dan ATM sehingga peserta PKH dapat mengambil sendiri dimanapun terdapat layanan ATM Bank BNI sehingga tidak bergantung kepada Pendamping karena uang bantuan langsung masuk ke rekening peserta PKH. Namun, setiap tahapan akan diinformasikan apabila sudah masuk ke rekening peserta PKH dan pada saat pengambilan atau tetap ditabung direkening setiap peserta PKH wajib melaporkan bukti atau cetak print kepada pendamping untuk dilaporkan ke Dinas Sosial. Pada saat pertemuan kelompok yang dilaksanakan selama dua kali dalam sebulan yaitu pada hari Selasa dan Jumat dilaksanakan dengan cara tatap muka dan diskusi kelompok serta kegiatan lain seperti senam dll.

**Tabel 3. Tabel Media Dalam Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul**

No.	Kasus	Media
1.	Pelaksanaan PKH	Buku Pedoman Pelaksanaan PKH
2.	Penyaluran Bantuan PKH	Buku Rekening, ATM, Bis Layanan Gerak (BLG), Himpunan Bank Negara (Himbara), dan Kantor Pos
3.	Pertemuan Kelompok	Diskusi Kelompok dan Tatap Muka

Sumber: Data Diolah Penulis

KOMUNIKAN

Komunikasikan dalam proses Komunikasi adalah penerima pesan. Dalam studi kasus komunikasi menerima pesan yang disampaikan. Komunikasi dalam proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul yaitu Peserta PKH atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH.

**Tabel 4. Tabel Komunikasi Dalam Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul**

No.	Kasus	Komunikasikan
1.	Pertemuan Kelompok	KPM atau Masyarakat Peserta PKH
2.	Diskusi Kelompok	KPM atau Masyarakat Peserta PKH
3.	Sosialisasi PKH	KPM atau Masyarakat Peserta PKH

Jika terjadi umpan balik atau feedback dari peserta PKH dalam proses komunikasi pemerintah pelaksanaan PKH maka posisi peserta PKH berubah menjadi komunikator

Sumber: Data Diolah Penulis

#### UMPAN BALIK ATAU FEEDBACK

Umpan Balik atau Feedback adalah efek dari proses komunikasi yang terjadi. Pesan yang disampaikan komunikator diterima oleh komunikan. Menurut Ardianto umpan balik adalah reaksi yang timbul kepada komunikator (Ardianto, Elvinaro, & Erdiyana, 2004). Setelah menerima pesan tersebut maka komunikan memberikan tanggapan dan memberikan reaksi terhadap pesan tersebut itulah yang dinamakan umpan balik.

Adanya komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat dalam pelaksanaan PKH sehingga selain masyarakat peserta PKH yang merasakan feedback atau umpan balik juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah dapat mencapai tujuan dari PKH sesuai dengan rencana dan harapan yaitu seperti Program Keluarga Harapan telah tepat sasaran, dapat mengurangi beban masyarakat miskin, dan mengetahui permasalahan atau keluhan di masyarakat yang berkaitan dengan PKH tugas Pemerintah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan tujuan. Sehingga dapat dilakukan pencarian solusi atau upaya yang tepat bagi Pemerintah untuk menangani permasalahan yang ada di masyarakat agar cepat teratasi dengan baik.

**Tabel 5. Tabel Feedback Proses Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan PKH**

No.	Kasus	Feedback Setelah Pesan Diterima	Respon Komunikator
1.	Masyarakat Peserta PKH/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan PKH	Masyarakat menerima bantuan PKH sebagai bantuan bersyarat dan berkomitmen untuk melakukan kewajiban untuk dapat memenuhi komitmen pada saat verifikasi setiap tahapan agar bantuan dapat turun.	Pemerintah melalui pendamping akan menyampaikan informasi bahwa bantuan telah masuk di rekening peserta PKH yang terverifikasi telah memenuhi komitmen.
2.	Pendamping PKH	Pendamping PKH melaksanakan	Pemerintah berkoordinasi setiap

---

<p>perintah dari Dinas Sosial Kabupaten untuk melakukan kegiatan pendampingan, pencatatan dan pelaporan, melakukan verifikasi peserta PKH, melakukan koordinasi pada saat penyaluran bantuan dilaksanakan.</p>	<p>pelaksanaan PKH seperti sosialisasi, rapat koordinasi dengan operator dan pendamping PKH.</p>
--	--

---

Sumber: Data Diolah Penulis

### HAMBATAN DALAM KOMUNIKASI PEMERINTAH

Pada proses komunikasi pemerintah diantara komunikator dan komunikan tentu akan terjadi hambatan dalam penyampaian sebuah pesan sebelum pesan dapat diterima oleh komunikan. Dalam proses komunikasi pemerintah pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul pada saat penyampaian pesan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada koordinator Kecamatan tidak ditemui adanya hambatan karena dapat diatasi oleh kedua belah pihak. Namun, hambatan dalam proses komunikasi pemerintah pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul hambatan ditemui pada saat pesan disampaikan kepada KPM karena komunikasi berjalan dari tingkat hierarkis yang berbeda. Hambatan yang ditemui disebabkan karena perbedaan status dan pada saat pelaksanaan PKH yaitu adanya pembatasan karena PKH sebagai program yang bersifat top down sehingga data awal kepesertaan berasal dari pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat mengusulkan untuk kepesertaan PKH atau tidak ada open system dari Kementerian. Berikut beberapa hambatan komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul :

**Tabel 6. Tabel Hambatan Dalam Proses Komunikasi Pemerintahan**

No.	Kasus	Hambatan
1.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan PKH	Perbedaan status (pendidikan, Kebiasaan/ Kebudayaan)
2.	Pelaksanaan PKH	Adanya pembatasan kepesertaan PKH

Sumber: Data Diolah Penulis

## **Kesimpulan**

Proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul berjalan dengan efektif dan cukup lancar. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program yang dirancang dengan sistem top down karena perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Sehingga lebih mudah untuk dilakukan komunikasi dan koordinasi antara komunikator dan komunikan.

Hambatan pada saat proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yaitu adanya perbedaan status karena komunikasi berlangsung dari tingkatan hierarki yang berbeda kemudian karena KPM sebagai masyarakat peserta PKH dengan mayoritas berpendidikan rendah. Dalam proses komunikasi pemerintah pelaksanaan PKH pembatasan menjadi hambatan karena PKH merupakan program yang dirancang dan diatur oleh pusat sehingga tidak ada open system yang mengakibatkan Pemerintah Daerah hanya dapat melaksanakan atas perintah dari pusat.

Pada proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH komunikasi berjalan dua arah sehingga dapat berubah posisi sesuai dengan siapa yang menjadi pembicara atau pemberi informasi dan siapa menjadi penerima pesan pada saat proses komunikasi. Komunikator dapat berperan sebagai komunikan dan komunikan dapat berperan sebagai komunikator pada saat terjadi umpan balik. Komunikator dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul adalah pihak Dinas Sosial yaitu oleh Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial serta Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

## **Kepustakaan**

- Abidin, Y. Z. (2016). *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ardianto, Elvinaro, & Erdiyana. (2004). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rorsdakarya Offset.
- Bachtiar, A. N. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Kabupaten Bantul . *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*.
- Dilla, S. (2012). *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hanif, A. (2016). Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Conditional Cash Transfer (CCT) (Kasus Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2014) . *Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada*.
- Hasan, E. (2014). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Imansari, R. (2015). Evaluasi Program Keluarga Harapan Berbasis Masyarakat Di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul DIY. *Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada*.
- Pedoman Umum PKH. (2016). Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Suntiana, L. (2015). Rancangan Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan (Kajian Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberbaru).

### **Wawancara Narasumber:**

Rahayu Martinngtyas, SH selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Zeni selaku Operator PKH Kabupaten Bantul

Irma Nur Ramadani selaku Koordinator Kecamatan Kasihan

Dewi Fauziah selaku Pendamping PKH

Rismawaty selaku Pendamping PKH

Suyamti & Parhilaj selaku Peserta PKH

### **Peraturan Pemerintah:**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan

Keputusan Bupati Bantul No. 143 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (TKPKH)